BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan berbasis gender merupakan fenomena sosial yang menarik untuk diteliti. Fenomena ini terjadi karena adanya dukungan dari tatanan sosial kompleks lainnya, seperti moral sosial-keagamaan, perspektif budaya, latar belakang ekonomi, ideologi, serta sistem hukum pendukung. Tatanan sosial inilah yang menyebabkan terjadinya praktik kekerasan berbasis gender. Secara umum, kekerasan berbasis gender melibatkan pihak-pihak yang terdekat seperti dalam suatu keluarga, diantaranya suami, istri, anak-anak, pekerja rumah tangga atau pembantu rumah tangga, atau anggota keluarga lainnya. Namun dari semua pihak dalam suatu keluarga tersebut, kekerasan berbasis gender sering terjadi dikarenakan prinsip patriarki, dimana laki-laki selalu menjadi pelanggar atau pelaku kekerasan sebaliknya perempuan selalu menjadi korban dalam tindakan tersebut.

Kata kekerasan menjadi kata yang sering dipergunakan untuk menjelaskan persoalan yang berkaitan dengan perlakuan atau tindakan yang dipandang tidak menyenangkan, tidak manusiawi, bertentangan dengan norma atau nilai dalam hukum, atau sesuatu yang bertentangan dengan kehendak dari dalam diri sendiri.

Mufti Makarim dalam jurnalnya menjelaskan berdasarkan kamus Cambridge Advanced Learner's Dictionary mengartikan kata "kekerasan"

sebagai:

1. *Violence (noun)*, yang berarti, “1. *Actions or words which are intended to hurt people; 2. Extreme force;*”
2. *Violation (adj)*, yang berarti, “1. *using force to hurt or attack; 2. Desciber a situation or event in which people are hurt or killed; 3. Sudden and powerful;*”
3. *Violation (noun)*, yang diartikan, ‘*an actions that breaks or acts agains something, especially law, agreement, principle, or something that should be treated with respect;*”¹

Jika diartikan dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Kekerasan (kata benda), yang berarti 1. Perbuatan atau perkataan yang dimaksudkan untuk menyakiti orang lain; 2. Kekuatan yang ekstrem.
2. Pelanggaran (adj), yang berarti 1. menggunakan kekuatan untuk melukai atau menyerang; 2. Menggambarkan situasi atau kejadian dimana orang terluka atau terbunuh; 3. Tiba-tiba dan kuat.
3. Pelanggaran (kata benda), yang diartikan sebagai, suatu tindakan yang melanggar atau bertindak melawan sesuatu, terutama hukum, perjanjian, prinsip, atau sesuatu yang harus diperlakukan dengan hormat.

Selanjutnya Mufti Makarim dalam jurnalnya juga menyampaikan istilah kekerasan yang diambil dari kamus Merriam-webster Dictionary mendefinisikan kekerasan (*violence, noun*) sebagai:

1. a: *exertion of physical force so as to injure or abuse (as ini warfare effecting illegal entry into a house) b: an instance of violent treatment or procedure;*
2. *injury by or as if by distortion, infringement, or profanation: outrage;*

¹Mufti Makarim, ”Memaknai kekerasan”, *Elsam: Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat*, Pusat Dokumentasi ELSAM, 2021, hlm. 1.

3. a: *intense, turbulent, or furious and often destructive action or force (the violence of the storm)* b: *vehement feeling or expression: fervor; also: an instance of such action or feeling* c: *a clashing or jarring quality: discordance;*
4. *undue alteration (as of wording or sense in editing a text);*²

Jika diartikan dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut:

1. a: Menggunakan kekuatan fisik untuk melukai atau menganiaya (seperti dalam peperangan yang mengakibatkan masuk secara paksa ke dalam rumah) b: suatu perlakuan yang kejam.
2. Melukai karena adanya adanya penyimpangan/pemutar-balikan, pelanggaran, atau pencemaran nama baik: kemarahan.
3. a: tindakan yang menggunakan kekuatan yang sangat hebat, penuh amarah, atau ganas dan merusak b: perasaan atau ekspresi yang berapi-api: ungkapan yang sangat bergairah; termasuk juga tindakan atau perasaan tersebut c: bentrok: pertentangan.
4. Perubahan yang tidak pantas (seperti kata-kata atau arti dalam suatu kalimat).

Secara ringkas Mufti Makarim dalam jurnalnya telah pula menyampaikan istilah kekerasan dalam kamus Oxford Dictionaries mengartikan kekerasan (*violence, noun*), sebagai:

1. *behaviour involving physical force intended to hurt, damage, or kill someone or something;*
2. (sebagai istilah hukum) *the unlawful exercise of physical force or intimidation by the exhibition of such force;* dan;
3. *Strength of emotion of a destructive natural force;*³

Jika diartikan dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut:

²*Ibid.*, hlm. 2.

³*Ibid.*

1. Perilaku yang melibatkan kekerasan fisik yang bertujuan untuk menyakiti, merusak, atau membunuh seseorang atau sesuatu.
2. (sebagai istilah hukum) penggunaan kekerasan fisik atau tekanan yang melanggar hukum dengan menggunakan kekerasan tersebut.
3. Kekuatan emosional merupakan kekuatan dari dalam yang merusak.

Sementara dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata kekerasan diartikan sebagai: “1. Perihal (yang bersifat, berciri) keras, 2. Perbuatan seseorang atau kelompok yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, 3. Paksaan.”⁴

Menurut Douglas dan Waksler bahwa istilah kekerasan sering digunakan untuk menggambarkan perilaku, yang terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*), yang bersifat menyerang (*offensive*) atau yang bertahan (*defensive*), serta disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain.⁵ Oleh karena itu secara umum ada empat jenis kekerasan yaitu:

1. Kekerasan terbuka, kekerasan yang dilihat, seperti perkelahian;
2. Kekerasan tertutup, kekerasan yang tersembunyi atau tidak dilakukan, seperti mengancam;
3. Kekerasan agresif, kekerasan yang dilakukan tidak untuk perlindungan, tetapi untuk mendapatkan sesuatu, seperti penjabalan; dan
4. Kekerasan defensif, kekerasan yang dilakukan untuk perlindungan diri.⁶

Kekerasan agresif maupun defensif dapat bersifat terbuka ataupun

⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 833.

⁵Prisilla Viviane Merung, “Kajian Kriminologi Terhadap Upaya Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia”, *Veritas et Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 Nomor 2*, Desember 2016, hlm. 402.

⁶*Ibid.*

tertutup. Pandangan terhadap definisi kekerasan diatas lebih menekankan pada sifat dari sebuah kekerasan. Bagaimana perbuatan kekerasan tersebut disebut terbuka, tertutup, agresif dan defensif.

Terdapat beberapa pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) mengatur unsur-unsur yang mengandung pengertian kekerasan, yaitu:

Pasal 351 KUHP

Penganiayaan diancam pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda paling banyak Rp300,00. Jika korban luka berat, yang bersalah dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, jika korban mati, dikenakan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun;

Pasal 353 KUHP

Penganiayaan dengan rencana, diancam pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Jika korban luka berat, dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Jika korban mati, dipidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun;

Pasal 354 KUHP

Penganiayaan berat, diancam pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun. Jika mengakibatkan kemarian, pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun;

Pasal 355 KUHP

Penganiayaan berat dengan rencana, dipidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Jika mengakibatkan kematian, pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun;

Dari beberapa contoh pasal diatas yang mengatur tentang kekerasan dapat dilihat bahwa kekerasan yang dimaksud dalam pasal tersebut bersifat umum, dan bisa menimpa siapa saja baik yang memiliki hubungan darah ataupun tidak memiliki hubungan darah, bahkan tidak saling mengenal, maka dari itu terbitlah peraturan yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang berpatokan pada segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga yang menurut Dadang Iskandar dalam

jurnalnya menjelaskan:

Pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus dan korban kekerasan dalam rumah tangga kebanyakan adalah perempuan sehingga harus mendapatkan perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.⁷

Edwin Manumpahi dalam jurnalnya menjelaskan: “Setiap keluarga ingin membangun keluarga bahagia dan penuh rasa saling mencintai baik secara lahir maupun batin, dengan kata lain bahwa setiap keluarga berharap dapat membangun keluarga harmonis dan bahagia yang sering disebut keluarga Sakinah.”⁸ Tetapi faktanya tidak semua keluarga dapat berjalan dengan baik dalam menjalankan bahtera rumah tangganya, karena terdapat keluarga yang tidak sepenuhnya merasakan kebahagiaan dan saling mencintai serta menyayangi, melainkan mendapat ketidaknyaman, tertekan atau kesedihan dan perasaan takut serta benci diantara anggota keluarga. Hal ini terindikasi dengan sering dijumpai rumah tangga yang bermasalah, hingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

Rumah dipercaya sebagai tempat paling aman dan nyaman untuk ditempati. Rumah merupakan tempat beristirahat terbaik dari segala kegiatan setelah seharian melakukan aktifitas pekerjaan. Didalam rumah setiap orang dapat bersikap apa adanya, tidak dibuat-buat menjadi diri sendiri. Secara umum pola pikir masyarakat bahwa tempat diluar rumah merupakan tempat

⁷Dadang Iskandar, ”Upayan Penanggulangan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Yustisi*, Vol.3, No.2, September 2016, hlm. 13.

⁸Edwin Manumpahi, “Kajian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologi Anak Di Desa Soakonora Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat”, *Jurnal Online: Acta Diurna Komunikasi*, Vol. V, No. 1., Maret 2016, hlm. 290.

berbahaya. Oleh karena itu apabila ditemukan kekerasan yang terjadi dalam rumah, maka akan menimbulkan pendapat yang sangat beragam. Ada yang beranggapan hal itu merupakan hal yang biasa sebagai pendisiplinan terhadap anggota keluarga hingga anggapan kekerasan yang dilakukan merupakan kejahatan yang harus dianggap serius.

Konsep kekerasan sebagai kejahatan dalam konteks kehidupan berumah tangga, sebagaimana yang dikonsepsikan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah dijabarkan dalam Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 yaitu:

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Bentuk kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga telah diatur pada Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu:

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;
- b. Kekerasan Psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang;
- c. Kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- d. Penelantaran rumah tangga, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang orang bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah

sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Frasa lingkup rumah tangga pun telah diatur pula dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu:

- (1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:
 - a. suami, isteri, dan anak;
 - b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
 - c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
- (2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Untuk ketentuan pidana terhadap lingkup rumah tangga diatur dalam beberapa pasal mulai dari Pasal 44 hingga Pasal 53 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Sebagaimana diketahui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan aturan khusus karena secara khusus telah mengatur mengenai bab tentang hak-hak korban, bab kewajiban pemerintah dan masyarakat, bab kewajiban pemerintah dan masyarakat, bab perlindungan dan bab pemulihan korban.

Selain itu terdapat faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga khususnya yang dilakukan oleh suami terhadap istri, sebagai berikut:

- a. Adanya hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara suami

dan istri. Budaya patriaki membuat laki-laki atau suami berada dalam tingkat kekuasaan yang lebih tinggi daripada perempuan atau istri, sehingga perempuan tidak jarang ketika sudah menikah dianggap sebagai milik suaminya. Hal tersebut menimbulkan ketimpangan dalam hubungan karena suami memiliki kuasa lebih terhadap istrinya dibandingkan istrinya sendiri.

- b. Ketergantungan ekonomi. Pendidikan dan budaya patriarki yang sudah menjadi bagian dalam masyarakat memberikan pandangan bahwa seorang istri memang seharusnya bergantung pada suami. Fenomena ini tidak jarang membuat sebagian istri tidak terbiasa mandiri atau berdaya secara ekonomi, sehingga ketika terjadi KDRT membuat istri harus bertahan. Perilaku seperti ini juga membuat suami merasa memiliki kuasa lebih akan ketidakberdayaan istrinya.
- c. Kekerasan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik. Kekerasan terhadap istri terjadi biasanya dilatar belakangi ketidaksesuaian harapan dengan kenyataan suami. Kekerasan dilakukan dengan tujuan agar istri dapat memenuhi harapannya tanpa melakukan perlawanan karena ketidakberdayaannya. Fenomena ini juga masih menjadi salah satu dasar budaya dalam masyarakat bahwa jika perempuan atau istri tidak menurut, maka harus diperlakukan secara keras agar ia menjadi penurut.
- d. Persaingan. Pada dasarnya manusia hidup memang penuh persaingan dan tidak pernah mau kalah, begitupun dengan sepasang suami dan istri. Persaingan antara suami istri terjadi akibat ketidaksetaraan antara keduanya untuk saling memenuhi keinginan masing-masing, baik dalam Pendidikan, pergaulan, penguasaan ekonomi, keadaan lingkungan kerja dan masyarakat dapat menimbulkan persaingan yang dapat menimbulkan terjadinya KDRT. Budaya juga membuat pandangan bahwa laki-laki tidak boleh kalah atau lebih rendah dari perempuan, sehingga tidak heran jika terjadi kekerasan terhadap perempuan atau istri hanya untuk memenuhi ego laki-laki atau suami.
- e. Frustrasi. Kekerasan juga dapat terjadi akibat lelahnya psikis yang menimbulkan frustrasi diri dan kurangnya kemampuan *coping stress* suami. Frustrasi timbul akibat ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan yang dirasakan oleh suami. Hal ini biasanya terjadi pada pasangan yang belum siap kawin, suami belum memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap yang mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan masih serba terbatas dalam kebebasan. Dalam kasus ini biasanya suami mencari perlarian kepada mabuk-mabukan dan perbuatan negatif lain yang berujung pada pelempiasan berbentuk kekerasan terhadap istrinya, baik secara fisik, seksual, psikis, atau bahkan penelantaran keluarga.
- f. Kesempatan yang kurang bagi perempuan dalam proses hukum. Dalam proses sidang pengadilan, sangat minim kesempatan istri

untuk mengungkapkan kekerasan yang dialaminya. Hal ini juga terlihat dari minimnya KUHAP membicarakan hak dan kewajiban istri sebagai korban, karena posisi dia hanya sebagai saksi pelapor atau saksi korban. Hal ini penting karena bisa jadi laporan korban kepada aparat hukum dianggap bukan sebagai tindakan kriminal tapi hanya kesalahpahaman dalam keluarga.⁹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian rumah tangga adalah “yang berkenaan dengan urusan kehidupan dalam rumah (seperti belanja rumah).”¹⁰ Sebagaimana frasa rumah tangga dapat dilihat dalam Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Perkawinan tersebut sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing dan atas perkawinan tersebut dicatatkan kepada lembaga yang berwenang sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Perkawinan. kemudian timbul permasalahan bagaimana jika perkawinan tersebut tidak dicatatkan ke lembaga yang berwenang. Maka jika diambil salah satu contoh dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa:

(1) Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan

⁹Rosma Alimi dan Nunung Nurwati, “Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan Halaman”, *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat*, Volume 2, Nomor 1, April 2021, hlm. 23-24.

¹⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.*, hlm. 982.

harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dalam Islam, perkawinan harus dicatatkan agar mempunyai kekuatan hukum dengan bukti telah terjadinya perkawinan berupa buku nikah.

Muncul permasalahan apabila kekerasan dilakukan oleh seseorang mengaku sebagai seorang suami dan korban merupakan seseorang mengaku istri yang telah hidup bersama dalam suatu rumah namun tidak dapat menunjukkan status hubungan dalam lingkup rumah tangga tersebut. Misalnya kekerasan dilakukan dalam perkawinan yang dilaksanakan secara agama Islam namun perkawinan tersebut dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah dan tidak tercatat di kantor urusan agama. Untuk diketahui bahwa perkawinan yang dilakukan secara agama Islam instansi yang melaksanakan pencatatan adalah Kantor Urusan Agama dan selain agama Islam instansi yang melaksanakan pencatatan adalah Kantor Catatan Sipil.

Pada umumnya masyarakat mengenal perkawinan yang dilakukan secara agama namun tidak dilakukan pencatatan ke instansi yang berwenang dengan sebutan perkawinan siri. Jika dilihat berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Nikah siri adalah pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang modin dan saksi, tidak melalui Kantor Urusan Agama, menurut

agama Islam sudah sah.¹¹

Apabila kekerasan dilakukan oleh suami dan korbannya adalah istri, dimana status suami dan istri ini didapat melalui perkawinan siri antara mereka. Disini dilihat terhadap diri pelaku tindak pidana kekerasan tersebut dapat dikenakan pidana umum sebagaimana yang telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau dapat pula dikenakan pidana khusus sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Sebagaimana diketahui terdapat putusan Hakim yang saling bertentangan satu sama lain dengan kasus posisi sama yaitu adanya suatu tindak pidana kekerasan yang terjadi dalam perkawinan siri, diantaranya sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Mbn dengan kasus posisi telah terjadi kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama Andeski Dwi Prama bin Arpan terhadap korban atas nama Siti Aisah binti Abdul Rozak, ditemukan fakta bahwa Terdakwa dan korban terikat perkawinan secara siri. Dimana Penuntut Umum mendakwakan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau Pasal 352 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, kemudian setelah pembuktian atas perbuatan Terdakwa

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Op. Cit.*, hlm. 920.

oleh Penuntut Umum dalam Tuntutannya menuntut bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan kemudian dalam perkara ini Majelis Hakim memutuskan dalam amar putusannya point 1 “menyatakan Terdakwa Andeski Dwi Prama bin Arpan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua” dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan terhadap putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

2. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Srl atas nama Terdakwa Wisnu Saputra bin Hermansyah yang didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu pertama diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dimana kasus posisi Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap korban yang merupakan istrinya yang menikah secara siri tanpa didaftarkan di Kantor Urusan Agama pada tanggal 12 Agustus 2020 dan telah hidup bersama selama 2 (dua) tahun berdasarkan

Surat Keterangan Nikah Nomor 470/-/SKN-LRH/X/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Resam Hilir, dan dalam pertimbangan Majelis Hakim, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan, menyundutkan api rokok, dan memaksa Saksi Tizah Andriani meminum Racun Roundap yang merupakan istri Terdakwa, meskipun korban bukan istri sah menurut Undang-undang Perkawinan dikarenakan tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama, hanya menikah secara siri/agama tetapi Terdakwa dan Saksi Tizah hidup bersama dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan belum dikaruniai anak, sehingga hubungan antara Terdakwa dan Saksi Tiza Andriani dapatlah digolongkan dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga dalil dalam nota pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa halaman 18 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pasangan nikah siri dimata negara tidak mendapat hak dan bertentangan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah pendapat yang tidak beralasan hukum karena perkawinan antara Terdakwa dan Saksi Tizah Andriani telah dilakukan secara agama dan oleh karenanya perkawinan tersebut adalah sah hanya saja belum dicatatkan dalam administrasi negara dan terhadap putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Dapat disimpulkan bahwa dalam Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Mbn Terdakwa telah terbukti secara hukum telah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan untuk pasal tersebut dihukum paling lama dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500,00 sedangkan dalam Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Srl Terdakwa telah terbukti secara hukum telah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan untuk pasal tersebut dihukum paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Berdasarkan hal tersebut diatas dengan ada perbedaan pada amar putusan tersebut sedangkan kasus posisinya sama, maka dapat dilihat bahwa penegak hukum pun dalam hal ini Hakim, dalam putusannya memiliki pendapat yang berbeda dalam menerapkan ketentuan tindak pidana kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga yang didasari oleh perkawinan siri. Sebagaimana menurut Barda Nawawi Arief bahwa: "Penegakan hukum adalah keseluruhan kegiatan dari para penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945."¹²

Sebagaimana diketahui pada bagian menimbang huruf c dan huruf d

¹²Arief, Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 8.

dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu:

- c. bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan;
- d. bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga;

Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terbentuk atau dibentuk karena adanya keinginan pemerintah untuk menjamin perlindungan terhadap korbannya yang kebanyakan adalah perempuan, sehingga dalam peraturan tersebut mengenai perlindungan untuk korban maupun anggota keluarga korban, telah diatur secara jelas dan rinci dalam Bab VI Perlindungan mulai dari Pasal 16 sampai dengan Pasal 38.

Selain itu apabila terdapat perbedaan pandangan atau penafsiran dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh para penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan dan hakim, maka hal ini akan mempengaruhi penerapan hukum positif terhadap penjatuhan hukuman kepada pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada perkawinan siri sehingga menimbulkan perasaan tidak nyaman kepada para korban, karena seharusnya ada perlakuan khusus yang didapat korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang telah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dari itu dengan permasalahan tersebut diatas maka dilakukan penelitian dengan menjadikannya tesis yang berjudul **“Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Perkawinan Siri Di Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

Dalam penulisan ini, penulis membagi perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum positif terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada perkawinan siri di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada perkawinan siri di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini dilakukan diantaranya:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai pengaturan tindak pidana tentang kekerasan dalam rumah tangga pada perkawinan siri di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai penerapan hukum dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga perkawinan siri di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini antara lain:

1. Manfaat secara teoritis, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi dan menambah pengetahuan serta

wawasan secara akademis. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi literatur hukum khususnya dalam bidang ilmu hukum pidana.

2. Manfaat secara praktis, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai media pembelajaran bagi masyarakat yang berkedudukan sama dihadapan hukum Indonesia dan aparat penegak hukum dalam kaitannya dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah tertentu. Kerangka konseptual menguraikan konsep-konsep yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti agar lebih mudah memahami dan menggambarkan objek yang akan diteliti dan dibahas dengan menguraikan pengertian-pengertian sebagai berikut:

1. Tindak Pidana

Tindak pidana dalam buku P.A.F. Lamintang, sebagaimana dirumuskan Hazewinkel-Suringa, adalah: “sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang

bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.”¹³ Selanjutnya dirumuskan Pompe, yaitu: “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.”¹⁴

2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Definisi kekerasan menurut *world health organization* adalah: “penggunaan kekuatan fisik atau kekuasaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran atau kesengajaan, bahaya atau tindakan terhadap seseorang atau kelompok dan juga masyarakat yang mengakibatkan adanya dampak yang terjadi, baik berupa psikologis ataupun mental.”¹⁵

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pengertian dari Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah:

Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Pengertian lingkup rumah tangga, juga diatur dalam Pasal 2 ayat

¹³P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 181-182.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 182.

¹⁵Gilang Prasetyo Kristianto Arisandi, “Analisis Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagaimana Dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 (Studi Kasus Sidang Perkara Nomor 3339/Pid.Sus/2018/PN. SBY), *Jurnal Judiciary*, Vol. 11, No. 2, 2022, hlm. 41-42.

(1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang menyatakan:

- (1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-undang ini meliputi:
 - a. Suami, isteri, dan anak;
 - b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
 - c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
- (2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

3. Perkawinan Siri

Perkawinan siri atau nikah siri merupakan sebuah perkawinan yang tidak dicatatkan secara administrasi pada Kantor Urusan Agama. Kata “sirii” secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yang berarti “rahasia”.¹⁶ Menurut Imam Maliki, nikah sirri adalah “Nikah yang atas dasar kemauan suami, para saksi pernikahan harus merahasiakannya dari orang lain sekalipun pada keluarga.”¹⁷

Secara etimologi dalam Kamus Bahasa Indonesia, pengertian nikah siri adalah “pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang modin dan saksi, tidak melalui Kantor Agama, menurut agama Islam sudah sah.”¹⁸

Jadi, berdasarkan pengertian-pengertian diatas, dapat dikemukakan bahwa maksud dari penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui mengenai

¹⁶Addin Daniar Syamdan dan Djumadi Purwoatmodjo, “Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya”, *Jurnal Notarius*, Vol. 12, No. 1, 2019, hlm. 456.

¹⁷*Ibid.*

¹⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Loc. Cit.*, hlm. 920.

tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada perkawinan siri, dimana kekerasan tersebut dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam rumah tangga yang terbentuk berdasarkan perkawinan yang tidak dicatatkan secara administrasi pada Kantor Urusan Agama.

F. Landasan Teoretis

Beberapa teori yang menjadi landasan pemikiran dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Kepastian Hukum

Aturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat dan menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis, sehingga tidak menimbulkan keraguan (multitafsir), logis dan mempunyai daya prediktabilitas. Kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum, Asas kepastian hukum diperlukan dalam terciptanya peraturan perundang-undangan karena menurut M. Kordela: *“the legal certainty as the superior principle of the system of formal principles of the rule of law justifies the legal*

validity of a defined group of values.”¹⁹ Yang jika diartikan dalam Bahasa Indonesia adalah kepastian hukum merupakan prinsip utama dari berbagai macam prinsip-prinsip supremasi hukum dalam suatu kelompok nilai tertentu.

Kemudian kepastian menurut Maxeiner dalam jurnal Samudra Putra Indratanto, terdapat dua fungsi yaitu: “menuntun masyarakat patuh pada hukum dan melindungi masyarakat terhadap perbuatan pemerintah yang sewenang-wenang yang dapat menggunakan kekuatannya dalam membuat dan menegakkan aturan hukum.”²⁰

2. Teori Tujuan Pidanaan

Tujuan pidanaan terdapat beberapa teori yang dianut oleh para pakar, dengan dasar pemikiran mengenai persoalan-persoalan mengapa suatu kejahatan dikenakan suatu pidana. Teori-teori hukum pidana ini berhubungan erat dengan subjektif *strafrecht* sebagai hak atau wewenang dalam menentukan atau menjatuhkan pidana terhadap pengertian (*objectief strafrecht*) peraturan hukum positif yang merupakan hukum pidana. Dalam perkembangan hukum pidana, tujuan pidanaan pada dasarnya berhubungan dengan tiga teori, yaitu:

a. Teori absolut atau teori pembalasan

Teori absolut merupakan teori tertua dan telah terjadi dalam beberapa abad. Menurut teori ini, pidana dipandangan sebagai

¹⁹Samudra Putra Indratanto, Nurainun dan Kristoforus Laga Kleden, “Asas Kepastian Hukum dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang”, *Jurnal Ilmu Hukum* 16, No. 1, 2020, hlm. 88-100.

²⁰*Ibid.*

pembalasan terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana. Dalam hal ini, pembalasan harus dilihat sebagai suatu relasi keras, yang bersifat emosional dan bersifat irasional.²¹ Teori absolut ini juga disebut sebagai teori retribusi.

Teori ini secara luas diikuti oleh para ahli hukum pidana. Sebagaimana dalam bukunya Chairul Huda, yang menuliskan bahwa:

Van Bemmelen mengatakan “pada dasarnya setiap pidana adalah pembalasan”, menurut Knigge mengatakan “menghukum pada dasarnya adalah melakukan pembalasan dan hal itu bukan suatu hal yang jelek dalam dirinya sendiri, melakukan pembalasan sebagai reaksi atas perilaku yang melanggar norma adalah tindakan manusia yang teramat wajar”. Pada pokoknya menurut teori pembalasan, tujuan pemidanaan adalah membalas atas tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat.²²

Sebagaimana dalam bukunya Masruchin Ruba’I menuliskan bahwa:

Menurut Immanuel Kant, Pidana dipandang sebagai “*kategorische imperative*” artinya seseorang harus dipidana oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan. Hal ini merupakan tuntutan keadilan absolut, sebagaimana yang dikemukakan oleh Kant dalam bukunya *Philosophy at Law* sebagai berikut:”.....Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan.”²³

²¹Masruchin Ruba’I, *Mengenal Pidana dan Pemidanaan Di Indonesia*, Penerbit IKIP Malang, Malang, 1994, hlm. 5-6.

²²Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm. 129.

²³Masruchin Ruba’i, *Op. Cit.*, hlm. 6.

Menurut teori absolut atau teori pembalasan, bahwa setiap kejahatan harus diikuti atau didasari dengan pidana, tidak boleh tidak tanpa tawar menawar. Dimana setiap orang dipidana karena telah melakukan suatu perbuatan kejahatan.

b. Teori relatif atau teori tujuan

Menurut Teori ini, “hukum pidana bertujuan untuk mencegah dan mengurangi kejahatan”.²⁴ Pidana harus dimaksudkan untuk mengurangi tingkah laku penjahat dan orang lain yang cenderung melakukan kejahatan. Teori ini melihat kedepan, sedangkan teori absolut hanya memperhatikan peristiwa yang telah berlalu.

Teori relative atau disebut juga dengan teori utilitaris. Sebagaimana dalam buku yang ditulis oleh Chairul Huda, “bahwa pembedaan mempunyai tujuan berdasarkan manfaat tertentu, dan bukan hanya sekedar membalas perbuatan pembuat”.²⁵ Sehingga pidana bukanlah hanya sarana untuk melakukan pembalasan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi mempunyai tujuan yang bermanfaat. Manfaat yang terbesar dari penjatuhan pidana kepada orang yang melakukannya adalah mencegah tindak pidana tersebut dilakukan. Baik itu pencegahan terhadap orang yang telah melakukannya (prevensi khusus), maupun pencegahan terhadap mereka yang sangat mungkin (*potential offender*) melakukan tindak pidana yang sama (prevensi umum).

²⁴*Ibid.*, hlm. 7.

²⁵Chairul Huda, *Op. Cit.*, hlm. 129.

Dalam bukunya Djoko Prakoso, mengemukakan bahwa menurut pandangan modern, prevensi sebagai tujuan dari pidana adalah:

Sasaran utama yang akan dicapai sebab itu tujuan pidana dimaksudkan untuk pembinaan atau perawatan bagi terpidana, artinya dengan penjatuhan pidana itu terpidana harus dibina sehingga setelah selesai menjalani pidananya, ia akan menjadi orang yang baik dari sebelum menjalani pidana.²⁶

c. Teori gabungan

Selain teori yang telah disebutkan sebelumnya yaitu teori absolut/pembalasan dan teori relative/tujuan terdapat pula teori ketiga yang disebut dengan teori gabungan. Teori ini muncul sebagai relasi dari teori sebelumnya yang dirasa kurang memuaskan menjawab mengenai tujuan dari ppidanaan itu sendiri. Tokoh utama yang menyampaikan teori gabungan ini adalah Pellegrino Rossi (1787-1848). Teori ini berakar pada pemikiran yang bersifat kontradiktif antara teori absolut/pembalasan dan teori relative/tujuan. Sebagaimana dalam bukunya Muladi dan Barda Nawawi Arief, bahwa Teori gabungan berusaha menjelaskan dan memberikan dasar membenaran tentang ppidanaan dari berbagai sudut pandang, yaitu:

- 1) Dalam rangka menentukan benar dan atau tidaknya asas pembalasan, mensyaratkan agar setiap kesalahan harus dibalas dengan kesalahan, maka terhadap mereka telah meninjau tentang pentingnya suatu pidana dari sudut kebutuhan masyarakat dan asas kebenaran.
- 2) Suatu tindak pidana menimbulkan hak bagi negara untuk menjatuhkan pidana dan ppidanaan merupakan

²⁶Djoko Prakoso, *Hukum Penitensir Di Indonesia*, Armico, Bandung, 1988, hlm. 23.

suatu kewajiban apabila telah memiliki tujuan yang dikehendaki.

- 3) Dasar pembenaran dari pidana terletak pada faktor tujuan yakni mempertahankan tertib hukum.²⁷

Selanjutnya dalam buku Muladi dan Barda Nawawi Arief, menurut Pellegrino Rossi bahwa:

Pemidanaan merupakan pembalasan terhadap kesalahan yang telah dilakukan, sedangkan berat ringannya pemidanaan harus sesuai dengan keadilan mutlak (*justice absolute*) yang tidak melebihi keadilan yang dikehendaki oleh masyarakat (*justice sosial*), sedangkan tujuan yang hendak dicapai berupa:

- 1) Pemulihan ketertiban,
- 2) Pencegahan terhadap niat untuk melakukan tindak pidana (*general preventief*),
- 3) Perbaikan pribadi terpidana,
- 4) Memberikan kepuasan moral kepada masyarakat sesuai rasa keadilan,
- 5) Memberikan rasa aman bagi masyarakat.²⁸

Dengan demikian, dalam teori gabungan berusaha untuk memadukan konsep-konsep yang dianut dalam teori absolut/pembalasan dan teori relative/tujuan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidaan dalam teori gabungan adalah disamping penjatuhan pidana harus membuat jera, penjatuhan pidana juga harus memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat dan terpidana itu sendiri agar tidak mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya.

G. Metode Penelitian

Menurut Suratman dan Philips Dillah dalam bukunya bahwa:

²⁷Muladi dan Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 19.

²⁸*Ibid.*

“Penentuan jenis/macam penelitian dipandang penting karena ada kaitan erat antara jenis penelitian itu dengan sistematika dan metode serta analisis data yang harus dilakukan untuk setiap penelitian. Hal demikian perlu dilakukan guna mencapai nilai validitas yang tinggi.”²⁹

Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa:

Penelitian hukum merupakan suatu proses yang bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum dan doktrin-doktrin hukum yang digunakan dalam menjawab isu hukum yang dihadapi, untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.³⁰

Metode penelitian hukum pada penelitian yuridis normatif yang dilakukan penulis, diantaranya:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipakai oleh penulis adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif merupakan penelitian yang menggunakan bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif, yang tidak memerlukan dukungan data atau fakta sosial.³¹

Penelitian hukum yuridis normatif atau kepustakaan mencakup:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b. Penelitian terhadap sistematik hukum;
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum;
- d. Perbandingan hukum;
- e. Sejarah hukum.³²

²⁹Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ketiga, Alfabeta, Bandung, 2022, hlm. 44.

³⁰Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 35.

³¹Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2022, hlm. 86-87.

³²*Ibid.*

Metode yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan menggambarkan dan menganalisis secara menyeluruh mengenai pengaturan serta penerapan kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada pernikahan siri di Indonesia dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berhubungan dengan hal tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan diantaranya adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan undang-undang (*statute approach*). Menurut Bahder Johan Nasution dilakukan dengan menelaah semua hal yang berkaitan dengan produk hukum yang berkaitan dengan penelitian.³³

Dalam penelitian ini Penulis mempelajari peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan rumusan masalah yang akan diteliti, antara lain sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- d. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004

³³ *Ibid.*, hlm. 92.

tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

- e. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- f. Aturan lain yang berkaitan.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah “penelitian terhadap konsep hukum yaitu sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum dan sebagainya.”³⁴ Dalam Penelitian ini Penulis berharap dapat menelaah, mengidentifikasi serta menganalisis pengertian hukum, konsep hukum serta asas hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.

Pendekatan kasus (*case approach*) adalah suatu metode pendekatan yang dilakukan dengan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi, yakni kasus-kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Dengan mengkaji pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan, sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang hadapi. Pendekatan kasus tersebut juga merupakan jenis pendekatan yang dilakukan dengan membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkret yang terjadi dilapangan, yakni dengan tujuan mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap suatu peristiwa hukum yang terjadi sesuai

³⁴ *Ibid.*

dengan prinsip-prinsip keadilan.³⁵

3. Pengumpulan Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki sifat autoritatif. Artinya bahan hukum tersebut memiliki otoritas, bahan hukum ini terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi dalam perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.³⁶ Bahan hukum primer yang digunakan dalam Penelitian ini diantaranya, sebagai berikut:

- 1) Undang-undang
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
 - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
 - d) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
 - e) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum

³⁵Irwansyah, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel)*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021, hlm. 138.

³⁶Marzuki, Peter Mahmud, *Op. Cit.*, hlm. 181.

Pidana.

- f) Aturan lain yang berkaitan.
- 2) Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap
- a) Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2020/PN Tjb
 - b) Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/ PT MDN
 - c) Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Mbn
 - d) Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Srl
 - e) Putusan Nomor 183/Pid.B/2008/ PN. SGT
 - f) Putusan Nomor 25/Pid/2009/PT. JBI
 - g) Putusan Nomor 84/Pid.B/2005/PN. Pol
 - h) Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN Srl

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang meliputi buku-buku, hasil karya ilmiah, jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan pengaturan dan penerapan kasus kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga pada perkawinan siri, pertemuan ilmiah atau pendapat dari kalangan pakar hukum sepanjang relevan dengan objek penelitian ini.

c. Bahan hukum tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan penunjang yang dapat menyempurnakan penelitian ini seperti ensiklopedia,

Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Terjemahan Inggris-Indonesia, majalah dan internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Analisis Bahan Hukum

Dalam melakukan analisis bahan hukum diterapkan teknik-teknik sebagai berikut:

- a. Teknik inventarisasi berupa pengumpulan bahan-bahan hukum, norma hukum dengan cara melihat isi dari berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Teknik sistematisasi yang merupakan upaya mencari hubungan suatu norma hukum aturan peraturan perundang-undangan yang sederajat maupun yang tidak sederajat.
- c. Teknik interpretasi diterapkan terhadap norma-norma hukum yang tidak jelas rumusnya sehingga harus ditafsirkan untuk memperoleh pemahaman yang jelas dan dapat diaplikasikan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi.

H. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran penulis terhadap penelitian sebelumnya, terdapat penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

No	Nama Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil
1	Syahanara Yusti Ramadona	Penegakan Hukum Tindak Pidana	1. Bagaimana penyelesaian perkara tindak pidana	1. Terjadi perbedaan penerapan hukum oleh para penegak hukum dalam penyelesaian

		Kekerasan pada Perkawinan Siri. ³⁷	kekerasan yang dilakukan oleh pasangan kawin siri ? 2. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan oleh pasangan kawin siri ?	tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada pasangan kawin siri, sebagian penegak hukum menggunakan KUHP dan sebagian lagi menggunakan undang-undang PKDRT. Dikarenakan adanya multi tafsir atau kabur norma dalam Pasal 2 undang-undang PKDRT. 2. Penegak Hukum khususnya Penuntut Umum dalam menghadapi perkara tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pasangan kawin sering menggunakan dakwaan alternatif yaitu yang diatur dalam KUHP dan PKDRT. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi paradigma yang dianut oleh Hakim.
--	--	---	---	--

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut diatas ditemukan persamaan dengan penelitian penulis yaitu pengkajian mengenai kekerasan yang terjadi dalam perkawinan siri serta ditemukan adanya kekaburan norma mengenai lingkup rumah tangga. Sedangkan perbedaannya adalah penulis memaparkan mengenai aturan hukum yang dapat diterapkan pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada perkawinan siri serta perbedaan penerapan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum khususnya penuntut

³⁷ Syahanara Yusti Ramadona, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Pada Perkawinan Siri*, Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, Jakarta, 2023.

umum dan majelis hakim, sehingga perlu adanya formulasi kembali mengenai pengertian perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan karena berimplikasi pada penerapan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

I. Sistematika Penulisan

Tesis ini terdiri dari 5 (lima) bab, tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub bab dan masing-masing bab mempunyai keterkaitan satu sama lain. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai pembahasan tesis ini, akan dikemukakan sistematikanya sebagai berikut:

- BAB I** Berisi tentang Pendahuluan. Dalam Bab ini diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Landasan Teoretis, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.
- BAB II** Berisi tentang Konsep. Dalam bab ini diuraikan mengenai Tindak Pidana, Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Perkawinan
- BAB III** Berisi tentang Pembahasan Masalah 1 (satu). Dalam bab ini membahas mengenai Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Perkawinan Siri. Bab ini mengkaji permasalahan-permasalahan yang terdapat pada bab pertama sub perumusan masalah pertama dengan menggunakan teori-teori yang ada pada bab kedua. Dalam hal ini adalah mengkaji

mengenai pengaturan mengenai tindak pidana kekerasan rumah tangga yang terjadi dalam perkawinan siri.

BAB IV berisi tentang Pembahasan Masalah 2 (dua). Dalam bab ini membahas mengenai Penerapan Hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada perkawinan siri. Bab ini mengkaji permasalahan-permasalahan yang terdapat pada bab pertama sub perumusan masalah kedua dengan menggunakan teori-teori yang ada pada bab sebelumnya. Dalam hal ini mengkaji Penerapan hukum dalam kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada perkawinan siri.

BAB V Berisi tentang Penutup. Dalam Bab ini ditarik kesimpulan atas rumusan masalah yang telah dibahas serta saran yang diberikan oleh Penulis sebagai bentuk dari pemikiran atas permasalahan yang diteliti.